

DATA DUKUNG

Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2023

Dipa (03) 099138

LAPORAN REALISASI ANGGARAN FACE

51 BELANJA
PEGAWAI

52 BELANJA
BARANG

53 BELANJA
MODAL

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahunan Tahun 2022. Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Gresik adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Gresik mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.05/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Negeri Gresik. Disamping itu, Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Gresik, 2 Oktober 2023
Sekretaris

IBNU USQIA, S.H., M.M.
NIP. 196709071993031001



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	vi
RINGKASAN	xi
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	xiii
NERACA	xiv
LAPORAN OPERASIONAL	xv
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	xvi
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	1
A. PENJELASAN UMUM	1
A.1 Dasar Hukum	1
A.2 Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Gresik	2
A.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	4
A.4 Basis Akuntansi	4
A.5 Dasar Pengukuran	4
A.6 Kebijakan Akuntansi	5
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	11
B.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak	11
B.2 Belanja Pegawai	13
B.3 Belanja Barang	14
B.4 Belanja Modal	15
B.4.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15
B.4.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	16
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	17
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran	18
C.2 Persediaan	18
C.3 Tanah	20
C.4 Peralatan dan Mesin	21
C.5 Peralatan dan Mesin Belum Diregister	21
Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku per Tahunan Tahun 2022 disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.	21

C.6 Gedung dan Bangunan	21
C.7 Jalan, Irigasi dan Jaringan	21
Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku per Tahunan Tahun 2022 disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan	21
C.8 Aset Tetap Lainnya	21
C.9 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	22
C.10 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	22
C.16 Aset Tak Berwujud	24
C.17 Aset Lain-Lain	24
C.13 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	24
C.14 Uang Muka dari KPPN	25
C.15 Ekuitas	26
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	26
D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	26
D.2 Beban Pegawai	26
D.3 Beban Persediaan	26
D.4 Beban Barang dan Jasa	27
D.5 Beban Pemeliharaan	27
D.6 Beban Perjalanan Dinas	27
D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi	27
D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	28
D.9 Kegiatan Non Operasional	28
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	28
E.1 Ekuitas Awal	28
E.2 Surplus (Defisit) LO	28
E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar	28
E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset	29
E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan	29
E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap	29
E.3.5 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	29
E.3.6 Koreksi Lain-lain	29
E.4 Transaksi Antar Entitas	30
E.5 Ekuitas Akhir	30
F.1	32
F.2	33

F.3 33

F.4 33

DAFTAR TABEL

Hal

<i>Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan</i>	<i>12</i>
<i>Tabel 2. Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja</i>	<i>12</i>
<i>Tabel 3. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja</i>	<i>13</i>
<i>Tabel 4. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Pegawai</i>	<i>14</i>
<i>Tabel 5. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Barang</i>	<i>14</i>
<i>Tabel 6. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal</i>	<i>15</i>
<i>Tabel 7. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin</i>	<i>16</i>
<i>Tabel 8. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan</i>	<i>16</i>
<i>Tabel 9. Perbandingan Rincian Aset Lancar Per Akun</i>	<i>17</i>
<i>Tabel 10. Perbandingan Rincian Persediaan Per Akun</i>	<i>18</i>
<i>Tabel 11. Perbandingan Rincian Aset Tetap Per Akun</i>	<i>19</i>
<i>Tabel 12. Perbandingan Aset Tetap antara Neraca SAIBA dan SIMAKBMN</i>	<i>20</i>
<i>Tabel 13. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap</i>	<i>22</i>
<i>Tabel 14. Perbandingan Rincian Aset Lainnya Per Akun</i>	<i>23</i>
<i>Tabel 16. Perbandingan Rincian Kewajiban Jangka Pendek Per Akun</i>	<i>25</i>

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Gresik yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 September Tahun 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Gresik telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Gresik, 2 Oktober 2023
Sekretaris Pengadilan Negeri Gresik



IBNU SOHA, S.H., M.M.
NIP. 196709071993031001

RINGKASAN

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Gresik Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Anggaran dengan Realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode Tahun 2023 dengan Tahun 2022.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 87.889.500.00 atau mencapai 147 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 59.835.000.00

Realisasi Belanja Negara pada Tahunan Tahun 2022 adalah sebesar Rp 77.384.500.00 atau mencapai 174 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 44.449.000.00

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada Tahun 2023

Nilai Aset Tahun 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp 4.947.290.00 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp 4.947.290.00 Aset Tetap (neto) sebesar 0.00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 0,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 4.947.290.00

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari Operasi, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa, Pos Luar Biasa dan Surplus/Defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode Tahun 2023 adalah sebesar (95.436.481.00) sedangkan jumlah Beban dari Kegiatan Operasional adalah sebesar Rp 0,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai 0.00 Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar 0.00 dan Rp 0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (95.436.481.00)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Tahun 2023 adalah sebesar Rp 4.947.290.00, ditambah Surplus/Defisit-LO sebesar (Rp 95.436.481.00), kemudian ditambah dengan penyesuaian nilai tahun berjalan, dampak kumulatif perubahan kebijakan dan transaksi antar entitas masing-masing senilai Rp 0,00, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal Tahunan Tahun 2022 adalah senilai Rp 12.599.641.00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas Laporan Keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2023 disusun dan disajikan berdasarkan Basis Kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahunan Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan menggunakan Basis Akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN**PENGADILAN NEGERI GRESIK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TAHUN 2023***(Dalam Rupiah)*

Uraian	Catatan	TA2023			TA 2022
		Anggaran	Realisasi	% Terhadap Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukar	B.1	59,835,000.00	87,889,500.00	147	44,449,000.00
Jumlah Pendapatan		59,835,000.00	67,530,000.00	113	44,449,000.00
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.2	-	-	-	-
Belanja Barang	B.3	173,797,000.00	163,930,380.00	94	163,703,325.00
Belanja Modal	B.4	-	-	-	-
Jumlah Belanja		173,797,000.00	163,930,380.00	94	169,074,000.00
PEMBIAYAAN					

NERACA

PENGADILAN NEGERI GRESIK NERACA TAHUN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C. 1	-	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C. 2	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C. 3	-	-
Persediaan	C. 4	4,947,290.00	12,599,641.00
Persediaan yang belum diregister	C. 5	-	-
Jumlah Aset Lancar		4,947,290.00	12,599,641.00
ASET TETAP			
Tanah	C. 5	-	-
Peralatan dan Mesin	C. 6	-	-
Peralatan dan Mesin yang Belum Diregister	C. 7	-	-
Gedung dan Bangunan	C. 8	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C. 10	-	-
Aset Tetap Lainnya	C. 11	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C. 12	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C. 13	-	-
Jumlah Aset Tetap		-	-
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C. 14	-	-
Aset Lain-Lain	C. 15	-	-
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C. 16	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
Jumlah Aset		-	-
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C. 17	-	-
Hibah Yang Belum Disahkan	C. 18	-	-
Uang Muka dari KPPN	C. 19	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-
Jumlah Kewajiban		-	-
EKUITAS			
Ekuitas	C. 20	4,947,290.00	12,599,641.00
Jumlah Ekuitas		4,947,290.00	12,599,641.00

LAPORAN OPERASIONAL

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TAHUN 2023**

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	87.889.500	77.384.500	10.505.000	13.575
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	87.889.500	77.384.500	10.505.000	13.575
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	87.889.500	77.384.500	10.505.000	13.575
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	96.520.181	75.450.504	21.069.677	27.925
Beban Barang dan Jasa	69.491.000	57.357.845	12.133.155	21.153
Beban Pemeliharaan	2.164.800	0	2.164.800	
Beban Perjalanan Dinas	15.150.000	34.100.000	(18.950.000)	(55.572)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	183.325,981	166.908.349	16.417,632	9.836
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(95.436,481)	(89.523,849)	(5.912,632)	6.605
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(95.436,481)	(89.523,849)	(5.912,632)	6.605
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(95.436,481)	(89.523,849)	(5.912,632)	6.605

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN NEGERI GRESIK LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG TAHUN 2023

(Dalam
Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	E. 1	12,599,641.00	5,194,500.00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E. 2	(95,436,481.00)	(89,523,849.00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E. 2.1	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E. 3	-	-
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3.1	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E. 3.2	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E. 3.3	-	-
Selisih Revaluasi Aset	E. 3.4	-	-
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E. 3.5	-	-
Lain-Lain	E. 3.6	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E. 4	87,784,130.00	96,928,990.00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E. 5	(7,652,351.00)	(7,405,141.00)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

A.1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 90/PMMK.06/2014;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2017 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;
15. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
16. ~~Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012~~ ^{Neraca | x} mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Urusan Administrasi dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

A.2 Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Gresik Rencana Strategis Pengadilan Pengadilan Negeri gresik Visi dan Misi Pengadilan Negeri Gresik

Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang akan menjadi pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan dalam 5 tahun ke depan dan telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 adalah sebagai berikut :
"Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung".

Penjelasan :

Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

Untuk memperjelas upaya pencapaian Visi tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di bawahnya menurunkan dalam 4 (empat) pilar Misi yang diuraikan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
- b. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.
- c. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan.IK

Kemudian Visi dan Misi Mahkamah Agung tersebut dijadikan acuan bagi Pengadilan Negeri Gresik sebagai Visi dan Misinya.

Tujuan

Pengadilan Negeri Gresik bisa menjadi BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG, apabila :

- a. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- b. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
- c. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- d. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Sasaran Strategis

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Gresik. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAKBMN adalah sistem yang menghasilkan informasi Aset Tetap, Persediaan dan Aset Lainnya untuk diperbandingkan dengan Neraca dan Laporan Barang Milik Negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.4 Basis Akuntansi

Mahkamah Agung Republik Indonesia menerapkan Basis Akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Basis Kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5 Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.6 Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Per 30 September Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam Laporan Keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan–LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber Pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan–LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas Pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan Pendapatan-LO pada Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut :
 - Pendapatan Persekot Gaji.
 - Pendapatan atas Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan.
 - Pendapatan atas Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber Pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam

Catatan atas Laporan Keuangan.

Neraca | x

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi Aset,

b. Aset Tetap

- Nilai Aset Tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan Aset Tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran untuk per satuan Peralatan dan Mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk Gedung dan Bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk Tanah, Jalan/Irigasi/Jaringan dan Aset Tetap Lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodifikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan Tahunan 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada Tahunan Tahun 2022 dan 2020. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.
- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

Piutang
Jangka
Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain Aset Lancar, Aset Tetap dan Piutang Jangka Panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan) dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi Akumulasi Amortisasi.
- Amortisasi Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat
<i>Software</i> Komputer	4 tahun
<i>Franchise</i>	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

- Aset Lain-lain berupa Aset Tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi Akumulasi Penyusutan.

Realisasi
Pendapatan
Negara Bukan
Pajak Rp
87.889.500.00

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp 87.889.500.00 atau mencapai 147 persen dari Estimasi Pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 59.835.000.00

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Pengadilan Negeri Gresik Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

(Dalam Rupiah)

Kode Perkiraan	Uraian	Tahun 2023				
		Anggaran	Realisasi Pendapatan Bruto	Pengembalian Pendapatan	Realisasi Pendapatan Neto	% Realisasi Anggaran
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan	-	-	-	-	0.00%
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan	-	-	-	-	0.00%
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan	-	-	-	-	0.00%
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti	-	-	-	-	0.00%
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian	-	-	-	-	0.00%
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai	-	-	-	-	0.00%
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang	-	-	-	-	0.00%
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun	-	-	-	-	0.00%
		-	-	-	-	0.00%

*Realisasi
Belanja
Negara Rp.
0.00*

Belanja

Realisasi Belanja Pengadilan Negeri Gresik per 30 September Tahun 2023 adalah sebesar Rp 0.00 atau 0.00 persen dari Anggaran Belanja sebesar Rp 0.00

Rincian Estimasi Belanja dan Realisasi Belanja Pengadilan Negeri Gresik Tahun 2023 tersaji sebagai berikut:

Tabel 2. Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023				
	Anggaran	Realisasi Belanja Bruto	Pengembalian Belanja	Realisasi Belanja Neto	% Realisa
Belanja Pegawai	-	-	-	-	0.00
Belanja Barang	-	-	-	-	0.00
Belanja Modal	-	-	-	-	0.00
Jumlah Belanja	-	-	-	-	-

Realisasi Belanja Tahun 2023 mengalami Penurunan sebesar Rp 0.00 atau sebesar 0.00 persen dibandingkan Tahun 2022.

Perbandingan rincian Realisasi Belanja Tahun 2023 dan Tahunan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja

(Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan (Penurunan)	
	TA 2023	TA 2022	(Rp)	%
Belanja Pegawai	-	-	-	-
Belanja Barang	163,930,380.00	163,703,325.00	227,055.00	0.14
Belanja Modal	-	-	-	-
Jumlah Belanja	163,930,380.00	163,703,325.00	227,055.00	0.14

Realisasi
Belanja
Pegawai Rp
0.00

B.2 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0.00 dan Rp 0.00 atau terjadi Peningkatan sebesar Rp 0.00 atau 0.00 persen.

Perbandingan rincian Realisasi Belanja Pegawai per 30 September Tahun 2023 dan Tahunan 2022 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Pegawai

(Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2023	TA 2022	(Rp)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	-	-	-	-
Belanja Gaji dan Tunjangan TMT/Polri	-	-	-	-
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	-	-	-	-
Realisasi Belanja Bruto	-	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-	-
Realisasi Belanja Neto	-	-	-	-

Realisasi
Belanja
Barang Rp
163.930.380.0
0

B.3 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun 2023 dan Tahunan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 163.930.380.00 dan Rp 163.703.325.00 Realisasi Belanja Barang Tahun 2023 mengalami Penurunan sebesar (Rp 227.055.00) atau 30 persen dari Realisasi Belanja Barang Tahun 2023.

Perbandingan rincian Realisasi Belanja Barang Tahun 2023 dan Tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Barang

(Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2023	TA 2022	(Rp)	%
Belanja Barang Operasional	-	-	-	-
Belanja Barang Non Operasional	-	-	-	-
Belanja Barang Persediaan	163.930.380	163.703.325.00	(227.055.00)	-
Belanja Jasa	-	-	-	-
Belanja Pemeliharaan	-	-	-	-
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	-	-	-	-
Realisasi Belanja Bruto	163.930.380.00	163.703.325.00	227.055.00	-
Pengembalian Belanja	-	-	-	-
Realisasi Belanja Neto	163.930.380.00	163.703.325.00	227.055.00	-

*Realisasi
Belanja
Modal Rp 0.00*

B.4 Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0.00 dan Rp 0.00

Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp 0.00 atau 0.00 persen dari Realisasi Belanja Modal Tahun 2022.

Perbandingan rincian Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 dan Tahunan 2022 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 6. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal

(Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi Anggaran		Kenaikan/(penurunan)	
	TA 2023	TA 2022	(Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-	0.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	0.00
Realisasi Belanja Bruto	-	-	-	0.00
Pengembalian Belanja	-	-	-	0.00
Realisasi Belanja Netto	-	-	-	0.00

*Realisasi
Belanja
Modal
Peralatan dan
Mesin Rp 0.00*

B.4.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 30 September Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0.00 dan Rp 0.00 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 30 September Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp 0.00 atau 0.00 persen dari Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023.

Perbandingan rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per Tahunan Tahun 2023 dan Tahunan 2022 tersebut antara lain:

Tabel 7. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

(Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2023	TA 2022	(Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-	-
Belanja Modal Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	-	-	-	-
Realisasi Belanja Bruto	-	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-	-
Realisasi Belanja Neto	-	-	-	-

*Realisasi
Realisasi
Belanja
Modal Gedung
dan Bangunan
Rp 0.00*

B.4.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0.00 dan Rp 0.00 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023 tidak mengalami atau kenaikan sebesar Rp 0.00 atau 0.00 persen dari realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023.

Perbandingan rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023 Tahun 2023 dan Tahun 2022 tersebut antara lain:

Tabel 8. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

(Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2023	TA 2022	(Rp)	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
Realisasi Belanja Bruto	-	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-	-
Realisasi Belanja Neto	-	-	-	-

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

ASET

Aset Lancar

Aset Lancar mencakup Kas dan Setara Kas yang diharapkan untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Saldo Aset Lancar Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 4.947.290.00 dan Rp 12.599.641.00 terjadi Penurunan sebesar (Rp 7.652.351.00) atau (60.73) persen.

Perbandingan rincian saldo Aset Lancar Tahun 2023 dan Tahun 2022 per akun disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 9. Perbandingan Rincian Aset Lancar Per Akun

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan /Penurunan
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-
2	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	-	-	-
3	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	-	-	-
4	Persediaan	4,947,290.00	12,599,641.00	(7,652,351.00)
5	Persediaan yang belum dregister	-	-	-
	Jumlah Aset Lancar	4,947,290.00	12,599,641.00	(7,652,351.00)

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp 0.00*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal Neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Pengadilan Pengadilan Negeri Gresik Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0.00 dan Rp 0,00, terjadi kenaikan sebesar Rp 0.00 atau 0.00 persen .

*Persediaan Rp
4.947.290.00*

C.2 Persediaan

Persediaan adalah Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 4.947.290.00 dan Rp 12.599.641.00 terjadi Penurunan sebesar (Rp 7.652.351.00) atau (60.73) persen.

Perbandingan rincian saldo Persediaan Tahun 2023 dan Tahunan 2022 per akun adalah sebagai berikut :

Tabel 10. Perbandingan Rincian Persediaan Per Akun

(Dalam Rupiah)

No	Kode Perkiraan	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1	117111	Barang Konsumsi	4,947,290.00	12,599,641.00
2	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	-	-
3	117911	Persediaan yang Belum Diregister	-	-
Jumlah			4,947,290.00	12,599,641.00

Aset Tetap Rp 0.00

Aset Tetap
 Aset Tetap adalah Aset Berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00 tidak terjadi kenaikan dan penurunan sebesar Rp 0.00 atau 0.00 persen.

Perbandingan rincian saldo Aset Tetap Tahun 2023 dan Tahunan Tahun 2022 per akun disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 11. Perbandingan Rincian Aset Tetap Per Akun

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/Penurunan
1	Tanah	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	-	-	-
3	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	-	-	-
4	Gedung dan Bangunan	-	-	-
5	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
6	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
7	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-
	Jumlah	-	-	-
8	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-	-	-
	Jumlah Aset Tetap	-	-	-

Komposisi Aset Tetap 2023 dan Tahun 2022 disajikan dalam grafik dibawah ini :

Grafik

Komposisi Aset Tetap



Tanah Rp 0.00 C.3 Tanah
Saldo Tanah yang dimiliki Mahkamah Agung Republik Indonesia di Wilayah Jawa Timur Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0.00 dan Rp 0.00 tidak terjadi kenaikan maupun penurunan pada aset tanah.

Mutasi transaksi Tanah Tahun 2023 tersebut dapat dijelaskan dan telah disajikan pada CalBMN

Peralatan dan Mesin Rp 0.00 C.4 Peralatan dan Mesin
Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0.00 dan Rp 0.00 terjadi kenaikan sebesar Rp 0.00 atau 0.00 persen.
Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Tahun 2023 disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Peralatan dan Mesin Belum Diregister Rp0,00 C.5 Peralatan dan Mesin Belum Diregister
Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Belum Diregister Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00, terjadi kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0 persen, terdapat pada :

Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Tahun 2023 disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Gedung dan Bangunan Rp 0.00 C.6 Gedung dan Bangunan
Saldo Gedung dan Bangunan Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah Rp 0.00 dan Rp 0.00, tidak terjadi kenaikan dan penurunan sebesar 0.00 atau sebesar 0.00 persen dari tahun 2023.

Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Tahun 2022 disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan

Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 0.00 C.7 Jalan, Irigasi dan Jaringan
Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah Rp 0.00 dan Rp 0.00 tidak terjadi kenaikan ataupun penurunan.
Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Tahun 2023 disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan

*Aset Tetap
Lainnya Rp
0.00*

C.8 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan dan Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Saldo Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah Rp 0.00 dan Rp 0.00 tidak terjadi kenaikan maupun penurunan.

Rincian Aset Tetap Lainnya, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Tahun 2023 disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan Rp
0,00*

C.9 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00 terjadi penurunan sebesar Rp 0.00 atau 0.00 persen, hal ini disebabkan karena pada tahun 2022 Pembangunan dengan KDP sudah selesai dan dijadikan asset definitif.

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan pada Lampiran A2 Laporan Keuangan ini.

Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap Rp
0.00

C.10 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0.00 dan Rp 0.00 terjadi kenaikan sebesar Rp 0.00 atau 0.00 persen.

Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2023 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 13. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	-	-	-
2	Gedung dan Bangunan	-	-	-
3	Jalan, Irigasi dan Jaring	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
	Jumlah	-	-	-

Rincian akumulasi penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Aset Lainnya
Rp 0.00

Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan Aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap, termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain.

Saldo Aset Lainnya Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah Rp 0.00 dan Rp 0.00 tidak terjadi kenaikan maupun penurunan.

Perbandingan rincian saldo Aset Lainnya Tahun 2023 dan Tahun 2022 per akun disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 14. Perbandingan Rincian Aset Lainnya Per Akun

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan /Penurunan
1	Aset Tak Berwujud	-	-	-
2	Aset Lain-Lain	-	-	-
Jumlah		-	-	-
3	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	-	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-	-

Komposisi Aset Lainnya Tahun 2023 dan Tahun 2022

Aset Tak Berwujud Rp 0.00 **C.16 Aset Tak Berwujud**
Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada lingkup Mahkamah Agung Republik Indonesia berupa *software* komputer yang digunakan untuk menunjang operasional kantor dan lisensi.

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah Rp0,00 dan Rp 0,00, tidak terjadi kenaikan maupun penurunan.

Rincian Aset Tak Berwujud, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku per Tahunan Tahun 2022 disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Aset Lain-Lain Rp 0.00 **C.17 Aset Lain–Lain**
Aset Lain-Lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Mahkamah Agung Republik Indonesia serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Saldo Aset Lain-lain Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah Rp.0.00, dan Rp 0.00, terjadi kenaikan sebesar Rp 0.00

Rincian Aset Lain-lain, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku per Tahunan Tahun 2022 disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp 0.00 **C.13 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya**
Akumulasi Penyusutan tersebut merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0.00 dan Rp 0.00, terjadi kenaikan sebesar Rp 0,00 atau 0,00 persen.

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

*Kewajiban
Jangka
Pendek Rp
0.00*

KEWAJIBAN

Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca.

Saldo Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp 0.00 dan Rp 0.00 tidak terjadi Kenaikan maupun penurunan sebesar Rp 0.00 atau 100 persen.

Perbandingan rincian saldo Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2023 dan Tahun 2022 per akun disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 15. Perbandingan Rincian Kewajiban Jangka Pendek Per Akun

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan /Penurunan
1	Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-
2	Utang yang belum ditagihkan	-	-	-
3	Hibah yang belum disahkan	-	-	-
3	Uang Muka dari KPPN	-	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-	-

Uang Muka dari KPPN Rp 6.600.000.00 **C.14 Uang Muka dari KPPN**
Saldo Uang Muka dari KPPN Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 6.600.000.00 dan Rp 0,00, terjadi kenaikan sebesar Rp 6.600.000.00 atau sebesar 100 %, merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Ekuitas Rp 4.947.290.00 **EKUITAS**
C.15 Ekuitas
Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban.
Saldo Ekuitas Tahun 2022 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar adalah masing-masing sebesar Rp 4.947.290.00 dan Rp 12.599.641.00, terjadi Penurunan sebesar Rp (7.652.351.00) atau (60.73) persen.

Pendapatan PNBPN Rp 87.889.500.00 **D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak
Jumlah Pendapatan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk periode yang berakhir pada Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 87.889.500.00 dan Rp 77.384.500.00, terjadi Kenaikan sebesar Rp 10.505.000.00

Beban Pegawai Rp 0.00 **D.2 Beban Pegawai**
Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pejabat Negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada Tahun 2023 dan Tahunan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0.00 dan Rp 0.00 tidak Terjadi Kenaikan maupun penurunan sebesar Rp 0.00 atau 0.00 persen dari tahun 2023.

Beban Persediaan Rp 96.520.181.00

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada Tahun 2023 dan Tahunan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 96.520.181.00 dan Rp 75.450.504.00 terjadi Kenaikan sebesar Rp 21.069.677.00 atau 27.925 persen.

Beban Barang dan Jasa Rp 69.491.000.00

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada Tahun 2023 dan Tahunan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 69.491.000.00 dan Rp 57.357.845.00 Terjadi Kenaikan sebesar Rp 12.133.155.00 atau sebesar 21.153 persen dari tahun 2022.

Beban Pemeliharaan Rp 2.164.800.00

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan Aset Tetap atau Aset Lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir Tahun 2023 dan Tahunan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 2.164.800.00 dan Rp 0.00 Terjadi kenaikan sebesar Rp 2.164.800.00 atau sebesar 100 persen dari tahun 2022.

Beban Perjalanan Dinas Rp 15.150.000.00

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada Tahun 2023 dan Tahunan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 15.150.000.00 dan Rp 34.100.000.00 Terjadi penurunan sebesar Rp (18.950.000.00) atau sebesar (55.572) persen dari tahun 2022.

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat Aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada Tahun 2023 dan Tahunan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0.00 dan Rp 0.00 Terjadi kenaikan sebesar Rp 0.00 atau sebesar 0.00 persen dari tahun 2022.

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan Beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan Piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada Tahun 2023 dan Tahunan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00

Kegiatan Non Operasional
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas dan fungsi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal
Nilai ekuitas pada Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 12.599.641.00 dan Rp 5.194.500 Terjadi Kenaikan sebesar Rp 7.405.141.00 atau sebesar 0,00 persen dari tahun 2022.

E.2 Surplus (Defisit) LO
Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara Surplus/Defisit Kegiatan Operasional, Kegiatan Non Operasional dan Kejadian Luar Biasa.

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah defisit sebesar (Rp 95.436.481.00) dan (Rp 89.523.849.00.00)

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar **E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar**
Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Penyesuaian Nilai Aset **E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset**
Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada Tahun 2023 dan Tahunan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

Koreksi Nilai Persediaan **E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan**
Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada Tahun 2023 dan Tahunan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Selisih Revaluasi Aset Tetap **E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap**
Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang Aset Tetap.

Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada Tahun 2023 dan Tahunan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Rp 0,00 **E.3.5 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi**
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi merupakan koreksi yang berasal dari transaksi koreksi nilai Aset Tetap dan Aset Lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada Tahun 2023 dan Tahunan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Nilai Aset Non Revaluasi sebesar Rp 0,00 merupakan pengurangan Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi dan Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi.

Koreksi Lain-lain Rp 0,00 **E.3.6 Koreksi Lain-lain**
Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada Tahun 2023 dan Tahunan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

Transaksi Antar Entitas Rp 87.784.130.00 **E.4 Transaksi Antar Entitas**
Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Nilai transaksi Antar Ekuitas untuk periode yang berakhir Tahun 2023 dan Tahunan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 87.784.130.00 dan Rp 96.928.990.00 Terjadi penurunan sebesar Rp (9.144.860.00) atau sebesar 0,00 persen dari tahun 2022.

Ekuitas Akhir Rp 4.947.290.00 **E.5 Ekuitas Akhir**
Nilai ekuitas pada Tahun 2023 dan Tahunan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 4.947.290.00 dan Rp 12.599.641.00 Terjadi Penurunan sebesar Rp (7.652.351.00) atau sebesar 15 persen dari tahun 2022.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal Neraca Tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Gresik.

F.2 Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI

Sampai dengan Tahun 2023 tidak terdapat temuan BPK RI untuk ditindaklanjuti.

F.3 Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional kantor Pengadilan Negeri Gresik sampai dengan Tahun 2023 sebanyak 3 rekening dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekening Bendahara Pengeluaran PENGADILAN NEGERI GRESIK 03	:	654440991381000	a/n	BPG	135
2. Rekening Bendahara Penerimaan	:	-			
3. Rekening Lainnya	:	-			
Jumlah	:	-			

F.4 Pengungkapan Penting Lain-lain

Tidak ada pengungkapan penting lain-lain.

Data Pendukung Laporan Keuangan

Daftar Isi

Laporan Realisasi Anggaran

LRA Pendapatan dan Pengembalian Pendapatan

LRA belanja dan Pengembalian Belanja

Neraca Percobaan

Neraca Keuangan (SAIBA)

Laporan Operasional

Laporan Perubahan Ekuitas

Neraca Barang Milik Negara (SIMAK-BMN)

Laporan Barang Kuasa Pengguna Intrakomptabel

Laporan Barang Kuasa Pengguna Gabungan

Laporan Barang Kuasa Pengguna Penyusutan Intrakomptabel

Laporan Barang Kuasa Pengguna Aset Tak Berwujud

Laporan Amortisasi Aset Tak Berwujud

Laporan Barang Kuasa Pengguna Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Laporan Barang Persediaan

Catatan Ringkas Barang Milik Negara

Laporan Catatan Ringkas Barang Milik Negara

Berita Acara Rekonsiliasi Internal per 31 Desember 2023

Rekening Koran per 31 Desember 2023

Kertas Kerja Telaah Per 31 Desember 203

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)



EMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
VILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR
SATUAN KERJA : (099138) PENGADILAN NEGERI GRESIK

Tgl Data : 22/01/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 22/01/24 9:48 AM
Halaman : 1
lap_lpe_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	12,599,641	5,194,500	7,405,141	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(95,436,481)	(89,523,849)	(5,912,632)	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	87,784,130	96,928,990	(9,144,860)	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(7,652,351)	7,405,141	(15,057,492)	-
EKUITAS AKHIR	4,947,290	12,599,641	(7,652,351)	-

eterangan :
ELUM FINAL
MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

GRESIK, 22 Januari 2024
Penanggung Jawab UAKPA
KELOMPOK PENGGUNA ANGGARAN



IBNU SOLA, SH., MM.
9678987999031001

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
 WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR
 SATUAN KERJA : (099138) PENGADILAN NEGERI GRESIK

Tgl Data : 22/01/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 22/01/24 9:47 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	87,889,500	77,384,500	10,505,000	13.575
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	87,889,500	77,384,500	10,505,000	13.575
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	87,889,500	77,384,500	10,505,000	13.575
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	96,520,181	75,450,504	21,069,677	27.925
Beban Barang dan Jasa	69,491,000	57,357,845	12,133,155	21.153
Beban Pemeliharaan	2,164,800	0	2,164,800	
Beban Perjalanan Dinas	15,150,000	34,100,000	(18,950,000)	(55.572)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR
SATUAN KERJA : (099138) PENGADILAN NEGERI GRESIK

Tgl Data : 22/01/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 22/01/24 9:47 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	183,325,981	166,908,349	16,417,632	9.836
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(95,436,481)	(89,523,849)	(5,912,632)	6.605
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(95,436,481)	(89,523,849)	(5,912,632)	6.605
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(95,436,481)	(89,523,849)	(5,912,632)	6.605

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

GRESIK, 22 Januari 2024
Penanggung Jawab UAKPA
KUSA PENGGUNA ANGGARAN



IBNU SOLA, SH., MM.
196705071993031001

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR
SATUAN KERJA : (099138) PENGADILAN NEGERI GRESIK

Tgl Data : 22/01/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 22/01/24 9:48 AM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	4,947,290	12,599,641	(7,652,351)	(60.73)
JUMLAH ASET LANCAR	4,947,290	12,599,641	(7,652,351)	(60.73)
JUMLAH ASET	4,947,290	12,599,641	(7,652,351)	(60.73)

EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	4,947,290	12,599,641	(7,652,351)	(60.73)
JUMLAH EKUITAS	4,947,290	12,599,641	(7,652,351)	(60.73)
JUMLAH EKUITAS	4,947,290	12,599,641	(7,652,351)	(60.73)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	4,947,290	12,599,641	(7,652,351)	(60.73)

Keterangan :
BELUM FINAL
) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

GRESIK, 22 Januari 2024

Benangung Jawab UAKPA

MANAJEMEN PENGUNA ANGGARAN



NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR

SATUAN KERJA : (099138) PENGADILAN NEGERI GRESIK

Tgl Data : 22/01/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 22/01/24 9:49 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	4,947,290	0
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	163,930,380
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	87,889,500	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	11,743,250
0.0	391111	Ekuitas	0	12,599,641
3.0	425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	0	8,590,000
3.0	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	6,520,000
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	15,540,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	57,239,500
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	17,760,500	0
3.0	521211	Beban Bahan	20,530,500	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	31,200,000	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	15,150,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	96,520,181	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	2,164,800	0
JUMLAH			276,162,771	276,162,771

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)**

IBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
: DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM 03
: PENGADILAN NEGERI GRESIK 099138

Tgl Data : 22/01/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 22/01/24 10:23 AM
Halaman : 2
lap_fra_face_satker_new



URAIAN	2023			2022		
	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN %
1	2	4	5	7	8	9
an	0	0	0	0	0	0
Jmum	0	0	0	0	0	0
il	0	0	0	0	0	0
mum	0	0	0	0	0	0
husus	0	0	0	0	0	0
husus Fisik	0	0	0	0	0	0
husus Non Fisik	0	0	0	0	0	0
arah	0	0	0	0	0	0
ian DIY	0	0	0	0	0	0
nusus	0	0	0	0	0	0
arah	0	0	0	0	0	0
(B.I + B.II)	173,797,000	163,930,380	94	169,074,000	163,703,325	(5,370,675)
	0	0	0	0	0	0
						97



UKAN TUTUP PERIODE

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : (03) DIREKTORAT JENDERAL, BADAN PERADILAN UMUM
 WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR
 SATUAN KERJA : (099138) PENGADILAN NEGERI GRESIK

Tgl Data : 22/01/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 22/01/24 9:49 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	163,930,380
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	87,889,500	0
3.0	425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	0	8,590,000
3.0	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	6,520,000
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	15,540,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	57,239,500
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	17,760,500	0
3.0	521211	Belanja Bahan	20,530,500	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	79,289,380	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	31,200,000	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15,150,000	0
JUMLAH			251,819,880	251,819,880

Keterangan :

BELUM FINAL

) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE



KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN

TINGKAT SATKER

TAHUN 2023

Kode Satker : 099138
 Nama Satker : Pengadilan Negeri Gresik
 Nama Eselon 1 : Badan Urusan Administrasi MARI
 Nama Kementerian : Mahkamah Agung RI

Objek Penelaahan	Kondisi LK	Seharusnya
<i>Beri tanda centang (√) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>		
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>		

KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN

Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok (<i>Hardcopy</i>)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. LRA <i>face</i>	√		Ada
2. Neraca <i>face</i>	√		Ada
3. Laporan Operasional <i>face</i>	√		Ada
4. Laporan Perubahan Ekuitas <i>face</i>	√		Ada
5. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja	√		Ada
6. Neraca Percobaan Akrual	√		Ada
7. Neraca Percobaan Kas	√		Ada
8. Catatan atas Laporan Keuangan	√		Ada

KESESUAIAN LAPORAN HARDCOPY DENGAN E-REKON&LK

	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Periksa semua <i>face</i> laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) apakah sama dengan e-Rekon&LK	√		Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan e-Rekon&LK sehingga seharusnya sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>			

KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI

Neraca <i>Balance</i>	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Satker Neracanya tidak <i>balance</i> ? Cek di e-Rekon&LK melalui menu "Daftar >> Neraca Tidak <i>Balance</i> "		√	Tidak
Saldo antar Laporan	Sama	Tidak	Seharusnya
2. Apakah Nilai " <i>Surplus/(Defisit)-LO</i> " di LO = Nilai " <i>Surplus/ (Defisit) - LO</i> " di LPE	√		Sama
3. Apakah Saldo " <i>Ekuitas Akhir</i> " di LPE = " <i>Saldo Ekuitas</i> " di Neraca	√		Sama
4. Pada LPE, apakah " <i>Ekuitas Awal</i> " + " <i>Kenaikan/Penurunan Ekuitas</i> " = " <i>Ekuitas Akhir</i> "	√		Sama
<i>Apabila perhitungan no.4 menghasilkan "tidak sama" berarti ada Satker melakukan jurnal menggunakan akun 391111, cari Satkernya menggunakan e-Rekon&LK kemudian perbaiki</i>			

NERACA PERCOBAAN AKRUAL

Pengecekan Saldo yang Tidak Normal Posisi Debet/Kreditnya	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun dengan uraian "null" atau tidak ada uraiannya		√	Tidak
2. Adakah "Saldo Tidak normal"? Cek e-Rekon&LK, menu "Daftar >> Saldo Tidak Normal", kecuali akun <i>Beban Penyisihan Piutang</i>		√	Tidak

Pengecekan Akun yang tidak boleh ada	Ada	Tidak	Seharusnya
Akun "Belum diregister"			
1. Adakah akun "Belum Diregister"? Cek e-Rekon&LK, menu "Daftar >> Aset Belum Diregister"		√	Tidak
<i>Pada LK Tahunan akun "Belum Diregister" tidak boleh ada</i>			

Akun "Aset , KDP, Penyusutan/Amortisasi dan Beban terkait Aset BLU"	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun "Persediaan, Aset, KDP, dan Beban terkait Aset BLU"		√	Tidak
2. Adakah akun " Akumulasi Penyusutan Aset Tetap/Amortisasi Aset Tak Berwujud terkait Aset BLU" (termasuk akumulasi penyusutan/amortisasi atas penghentian aset tetap/aset tak berwujud)		√	Tidak
<i>Mulai Laporan Keuangan Semesteran 2017 tidak ada lagi akun Aset dan Beban terkait Persediaan/Aset "BLU"</i>			

Akun Ekuitas (3xxxxx)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 391121 (Ekuitas Transaksi Lainnya)		√	Tidak
2. Adakah akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		√	Tidak
Akun Perpajakan (41xxxx)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 41xxxx (Pendapatan Perpajakan) kecuali BA.015.04 ?		√	Tidak

Akun Khusus BUN (Tidak boleh ada di KL)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Akun 1111xx hingga 1115xx? (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		√	Tidak
Transaksi Hibah, Bunga, Subsidi, Lain-lain, dan Transfer merupakan Transaksi BUN, periksa apakah ada akun dengan uraian diatas, yaitu:			
2. Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (<i>prepaid</i>)	√		Tidak
3. Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain	√		Tidak
4. Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar	√		Tidak
5. Akun 423954/5/6/8/9 Penerimaan kembali belanja Kewajiban Utang/Subsidi/hibah/ lain-lain/transfer TAYL	√		Tidak
6. Adakah akun 43xxxx (Pendapatan Hibah)	√		Tidak
7. Adakah akun 54xxxx (Beban Bunga)	√		Tidak
8. Adakah akun 55xxxx (Beban Subsidi)	√		Tidak
9. Adakah akun 56xxxx (Beban Hibah)	√		Tidak
10 Adakah akun 58xxxx (Beban Lain-lain)	√		Tidak
<i>Selain akun2 diatas, masih ada akun2 khusus BUN, seperti 421611, 423252, 423253, 423254, 423341, dll)</i>			

Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun yang tidak normal keberadaannya? (misalnya pendapatan SIM/STNK/Kejaksaaan ternyata terdapat pada Kementerian Kesehatan)		√	Tidak
2. Adakah akun 423319 Pendapatan Bunga Lainnya Di KL? (seharusnya 423221 (Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro))		√	Tidak
Jika Tidak Memiliki Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian BLU?		√	Tidak
2. Adakah akun 424xxx (Pendapatan BLU)		√	Tidak
3. Adakah akun 525xxx (Belanja Barang dan Jasa BLU)		√	Tidak
4. Adakah akun 527xxx (Belanja Modal BLU)		√	Tidak

Hibah Langsung	Ya	Tidak	Seharusnya

1. Adakah saldo 218211 (hibah langsung yang belum disahkan) pada awal tahun ?		√	Ya/Tidak
2. Apakah Saldo Akun "Hibah langsung yang belum disahkan" pada akhir tahun sama nilainya dengan Saldo Awal 2017 ?		√	Ya
<i>Jika lebih kecil, kemungkinan ada jurnal yang mengurangi akun 218211 (cek apakah jurnal tsb. Benar), jika lebih besar, kemungkinan ada hibah langsung tahun 2017 yang belum disahkan (Segera disahkan)</i>			
3. Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?		√	Ya
Transfer Masuk (TM) dan Transfer Keluar (TK)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Isi kolom di sebelah kanan hasil dari perhitungan akun TM dikurangi akun TK	Rp.		
2. Jika kolom No.1 bernilai positif, adakah TM dari KL lain senilai tsb.?		√	Ya
3. Jika kolom No.1 bernilai negatif, adakah TK ke KL lain senilai tsb. ?		√	Ya
<i>Lakukan telaah menggunakan e-rekon&LK (menu monitoring >> Transfer Masuk/Keluar)</i>			
Telaah Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)?	√		Ya/Tidak
2. Jika ada, mungkinkah mendapat Aset dari Perolehan Lainnya?	√		Ya/Tidak
Pendapatan (491511) dan Beban (593311) Penyesuaian Nilai Persediaan	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Isi kolom di sebelah kanan hasil dari perhitungan akun 491511 dikurangi akun 593311	Rp.		
2. Apakah selisih nilai diatas normal ? Tidak terlalu besar atau terlalu kecil?		√	Tidak

LAPORAN OPERASIONAL

Pengecekan Pos/Akun yang tidak boleh ada	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah pendapatan Perpajakan (Kecuali BA.015)		√	Tidak
2. Adakah pendapatan Hibah		√	Tidak
3. Adakah beban bunga		√	Tidak
4. Adakah beban subsidi		√	Tidak
5. Adakah beban hibah		√	Tidak
6. Adakah beban transfer		√	Tidak
7. Adakah beban lain-lain		√	Tidak
Pengecekan saldo Normal	Ada	Tidak	Seharusnya
8. Adakah akun "null" atau tidak ada uraiannya		√	Tidak
9. Apakah seluruh akun bernilai positif?	√		Ya
<i>Seluruh Akun LO Nilai Normalnya adalah Positif (baik pada Kegiatan Operasional, Non Operasional maupun Pos Luar Biasa), kecuali beban penyisihan piutang dapat bernilai negatif. (yang harus positif adalah akunnya, sedangkan penjumlahan/sub penjumlahan pada LO dapat bernilai Negatif).</i>			
Kebenaran Beban Penyisihan Piutang sesuai Perdirjen 43/2015	Ya	Tidak	Seharusnya
11. Saldo Awal Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) - Saldo Akhir Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) = Beban Penyisihan Piutang LO	√		Ya
<i>Jika hasil diatas "tidak", maka cek apakah ada penghapusan piutang dan/atau koreksi piutang senilai selisih diatas. Jika tidak ada, kemungkinan salah dalam menjurnal penyisihan piutang.</i>			

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Pengecekan akun tertentu	Ada	Tidak	Seharusnya
---------------------------------	------------	--------------	-------------------

1. Adakah saldo Pos "penyesuaian Nilai Aset" ?		√	Tidak
2. Adakah saldo akun "Selisih Revaluasi Aset Tetap" ?		√	Ada/Tidak
<i>Bila ada "Selisih Revaluasi Aset tetap" apakah benar ada Penilaian Kembali/Revaluasi BMN dari DJKN/KPKNL?</i>		√	Ada
Pengecekan akun koreksi			
Cetak seluruh akun koreksi per Satker dari e-Rekon&LK (Menu Rincian >> Rincian LK >> Daftar Saldo Akrua), yaitu 391113, 391114, 391116, 391118 dan 391119	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud ?	√		Ya

NERACA

	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	√		Ya
2. Adakah pos "Belum Diregister"?		√	Tidak
3. Dari kolom perbandingan antara Tahun 2017 dengan 2016, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar (terlalu tinggi) tanpa penjelasan?		√	Tidak
4. Normalnya total ASET akan naik dibanding tahun 2016, Apakah demikian?	√		Ya

TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN

Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya, bila jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya juga "TIDAK"

Pengecekan telah melakukan penyisihan piutang	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun:		√	Ada/Tidak
- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/Penyisihan TP/TGR (Neraca)	√		Ada
- Beban Penyisihan Piutang (di LO)	√		Ada
Pengecekan telah melakukan reklasifikasi piutang jk. Panjang.	Ada	Tidak	Seharusnya
2. Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun:		√	Ada/Tidak
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang	√		Ada
Pengecekan persediaan	Ada	Tidak	Seharusnya
3. Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun:	√		Ada/Tidak
- Beban Persediaan (di LO)	√		Ada
- Pendapatan Penyesuaian Persediaan (akun 491511 di Neraca Percobaan)	√		Ada
- Beban Penyesuaian Persediaan (akun 593311 di Neraca Percobaan)	√		Ada
Pengecekan penyusutan aset tetap	Ada	Tidak	Seharusnya
4. Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun:	√		Ada/Tidak
- Akumulasi AT/AL (Neraca)	√		Ada
- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	√		Ada
Pengecekan Beban Diserahkan ke Masyarakat & Beban Bansos	Ada	Tidak	Seharusnya
5. Adakah beban barang diserahkan ke Masyarakat?		√	Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 526xxx pada neraca percobaan kas ?		√	Ya
6. Adakah beban bansos?		√	Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 57xxxx pada neraca percobaan kas ?		√	Ya
Pengecekan Jurnal Akrua	Ada	Tidak	Seharusnya
7. Adakah realisasi pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (423141/2/3 atau 42492x) ?		√	Ada/Tidak

- Ada pendapatan sewa diterima Dimuka (akun 219211) pada Neraca ?		√	Ada/Tidak
8. Adakah realisasi Belanja Sewa di Neraca Percobaan Kas (522141) ?		√	Ada/Tidak
- Ada belanja Barang dibayar dimuka pada Neraca		√	Ada/Tidak
9. Adakah realisasi belanja Jasa Listrik/telepon/air di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9) ?	√		Ada/Tidak
- Ada Belanja Barang yang masih harus dibayar pada Neraca	√		Ada

KESESUAIAN DENGAN L-BMN

	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah semua akun di Neraca LKKL sama dengan di L-BMN?	√		Ya
<i>Jika telah menggunakan SIMAK e-Rekon (e-Rekon&LK G2) maka lihat pada menu "monitoring >> rekon internal"</i>			
2. Apakah menurut e-Rekon-ik terdapat Jurnal Tidak lazim (menu Daftar >> Jurnal Tidak Lazim) yaitu jurnal dengan akun Persediaan/Aset yang seharusnya hanya kiriman dari Aplikasi SIMAK ?		√	Tidak
<i>Jika ada, apakah jurnal tersebut telah benar? lakukan pengecekan</i>			

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Pagu Minus? (<i>Cek melalui e-Rekon-ik menu daftar >> pagu minus</i>)		√	Tidak
2. Ada uraian jenis belanja " <i>tidak ada</i> " pada Neraca Percobaan Kas?		√	Tidak
3. Adakah TDK pada Aplikasi e-Rekon&LK ? (Menu Monitoring >> Transaksi Dalam Konfirmasi") atas seluruh jenis TDK baik pada Satker DIPA Aktif maupun Tidak Aktif ?		√	Tidak

PENGAWASAN TEMUAN BPK TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Telaah ini bertujuan meminimalisir adanya temuan tahun lalu yang belum diselesaikan dan terjadinya temuan yang berulang. Dibawah ini adalah contoh-contoh telaahnya.

Pertanyaan berdasarkan temuan-temuan BPK tahun-tahun lalu	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah sudah dibuat Berita Acara <i>Stock Opname</i> Persediaan ?	√		Ya
2. Masih adakah kesalahan akun belanja Persediaan		√	Tidak
3. Apakah PNBPN telah disetor tepat pada waktunya (tidak terlambat)	√		Ya
4. Adakah PNBPN digunakan langsung?		√	Tidak
5. Apakah seluruh pendapatan dan Belanja BLU telah disahkan (di-SP3B-BLUkan)?	√		Ya
6. Apakah seluruh hibah langsung telah disahkan (di-SP2HL-kan)?	√		Ya
7. Apakah semua jurnal manual di SAIBA telah dibuatkan Memo Pencatatannya beserta dokumen terkait?	√		Ya

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kesesuaian antara Face Laporan dan CaLK	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Rincian yang ada di CaLK sama dengan LKKL (Neraca Percobaan)	√		Sama
Kecukupan pengungkapan pada CaLK	Ya	Tidak	Seharusnya
2. Apakah pengungkapan KDP telah sesuai?	√		Ya
3. Apakah pengungkapan Revaluasi BMN telah sesuai baik pada Penjelasan Umum, LO, LPE dan Neraca ?	√		Ya
4. Apakah format dan penjelasan akun-akun LPE telah sesuai?	√		Ya

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan e-Rekon&LK"

Mengetahui

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Jhnu Sola, S.H., M.M.

NIP. 196709081993031001

Gresik, Pebruari 2023

Peneleah,

Lazuardhi Zein Endrinata, S.E., S.H.

NIP. 197805312005021001